

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Pembangunan politik di Indonesia merupakan bagian dari upaya demokratisasi dan penghormatan hak asasi manusia. Terutama dalam bidang pendidikan yang merupakan konsep sosial yang diintroduksi kedalam pemerintahan agar pemerintah dapat menjadikannya sebagai kebijakan pemerintah. Karena hanya pemerintah yang dianggap sangat representatif di tempatkan diatas kepentingan maupun praktik edukatif dari seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan merupakan suatu proses sosial yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Proses memanusiakan manusia dalam pendidikan dianggap sebagai rangkaian proses pemberdayaan potensi dan kompetensi individu untuk menjadi manusia berdaya yang berkualitas sepanjang hayat. Pendidikan mampu mengangkat kehidupan manusia ke dalam kelas sosial yang lebih tinggi seperti yang diungkapkan oleh Clark yang menyatakan bahwa pendidikan dapat dipergunakan untuk membantu penduduk dalam meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi melalui usaha mereka sendiri (Sulfasyah,S.,& Arifin, 2016)

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi diri, membentuk karakter, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan keterampilan hidup, dan persiapan untuk menghadapi tantangan global.

Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Setiap individu memiliki bakat dan kemampuan yang unik, dan pendidikan berperan dalam membantu individu mengidentifikasi, mengasah, dan mengoptimalkan potensi tersebut. Dengan pendidikan yang tepat, seseorang dapat menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran politik dan membangun fondasi demokrasi yang kuat. Menurut Huntington (1991), pendidikan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mempersiapkan individu untuk berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam sistem demokrasi. Dengan pendidikan yang baik, individu tidak hanya memahami sistem politik yang ada, tetapi juga mampu menilai kebijakan publik, berpartisipasi dalam pemilu, dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks politik.

Menurut Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics, "Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu hubungan negara dengan warga negaranya serta nengara-negara lainnya". Pendidikan dan politik saling berkaitan sebagai kebijakan pendidikan dan dampaknya pada pembangunan sosial keputusan politik mengenai anggaran dan kebijakan pendidikan mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan di suatu negara. Politisi dan

pembuat kebijakan menetapkan prioritas dalam pendanaan dan reformasi pendidikan, yang berdampak langsung pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dapat mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan mobilitas sosial, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, hubungan antara pendidikan dan pembangunan politik sangat relevan dalam konteks pembangunan nasional. Pendidikan dianggap sebagai instrumen penting untuk membangun karakter bangsa dan memperkuat demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 31, menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata”. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal ketimpangan akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang belum merata di berbagai wilayah.

Pembangunan nasional Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Pada dasarnya esensi pembangunan adalah upaya menuju “nation and character building” (proses pembinaan dan pembangunan watak bangsa). Dalam konteks ini, manusia sebagai makhluk politik memerlukan media untuk berekspresi dan mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Untuk itu, diperlukan prana dan perangkat politik yang mampu menampung potensi, aspirasi, harapan, dan cita-cita politik masyarakat. Setiap bangsa memiliki cara khas dalam mewujudkan hal tersebut. Pembangunan politik dalam konteks ini juga memiliki makna yang lebih luas dan mendesak daripada sekadar kepentingan ekonomi, berusaha mensosialisasikan nilai-nilai, filsafat, dan pandangan hidup bangsa melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Ini adalah tugas berat yang harus diselesaikan dalam pembangunan politik setiap bangsa. Sementara itu, UUD 1945 yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan terdapat dalam pasal 31 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kemajuan kesejahteraan umat manusia

Tujuan politik pendidikan nasional yang paling pokok adalah persoalan pemerataan pendidikan nasional, yang bisa diartikan bahwasanya semua rakyat Indonesia bisa mengakses pendidikan tidak terhalangi oleh faktor, baik latar belakangnya, etnisnya, agamanya sukunya bahasa nya, maupun ekonominya. Persoalan tersebut sampai sekarang masih belum bisa dikatakan sebagai bentuk program yang berhasil.

Terutama di daerah-daerah terpencil seperti Sulawesi Barat, tantangan dalam bidang

pendidikan masih sangat besar. Ketertinggalan pendidikan di Sulawesi Barat menjadi isu yang mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia, yang terbentuk pada tahun 2004. Meskipun telah berjalan selama hampir dua dekade, provinsi ini masih menghadapi berbagai masalah dalam bidang pendidikan. Infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pendidik, serta minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan merupakan beberapa faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan pendidikan di daerah ini.

1. **Pertama**, masalah infrastruktur menjadi hambatan besar bagi akses pendidikan di Sulawesi Barat. Banyak sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas dasar seperti gedung sekolah yang layak, peralatan belajar, dan akses terhadap teknologi informasi. Jalan yang sulit ditempuh, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman, memperparah situasi ini, sehingga banyak anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh untuk dapat bersekolah.
2. **Kedua**, kualitas dan distribusi tenaga pendidik di Sulawesi Barat juga menjadi tantangan. Sebagian besar tenaga pendidik yang ada tidak memiliki kualifikasi yang memadai, dan masih banyak daerah yang kekurangan guru, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, yang pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya tingkat pencapaian akademis di provinsi ini.
3. **Ketiga**, faktor ekonomi juga berperan dalam ketertinggalan pendidikan di Sulawesi Barat. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat banyak keluarga tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali lebih memilih untuk membantu orang tua mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikan. Hal ini berdampak pada tingginya angka putus sekolah di provinsi ini.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik (2017), angka anak putus sekolah di Sulawesi Barat sangat memprihatinkan. Kabupaten Polewali Mandar mencatat angka tertinggi dengan 35,61%, diikuti oleh Mamuju dengan 17,11%, Mamasa dengan 16,59%, Majene dengan 15,83%, dan Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan 9,16%. Tingginya angka putus sekolah ini mencerminkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan di Sulawesi Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan laporan pemerintah daerah, Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan signifikan terkait putus sekolah dan anak tidak bersekolah. Sekitar 48.000 anak di Sulbar dilaporkan tidak sekolah pada rentang 2021–2024, yang menunjukkan angka cukup tinggi dalam konteks pembangunan pendidikan daerah. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dengan membentuk Satgas Penanganan Anak Tidak Sekolah berhasil merekonsiliasi dan menurunkan jumlah kasus setelah verifikasi, menunjukkan pentingnya akurasi data dalam penanganan masalah ini. Permasalahan putus sekolah juga bervariasi menurut jenjang pendidikan, dengan fluktuasi jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK selama periode 2021–2023.

Kesuksesan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Sulawesi Barat memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah

daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Pada sistem demokrasi, tidak semua pendapat masyarakat akan diterima oleh pemerintah sehingga berlakulah sistem perwakilan rakyat dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya dalam suatu pesta demokrasi. Lembaga ini kemudian menjadi media perwakilan untuk menyampaikan semua aspirasi masyarakat. Di Sulawesi Barat terdapat 1 dapil yang bertugas di Komisi X yaitu Ratih Megasari Singkaru. Yang dimana diketahui bahwa Komisi ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan merumuskan kebijakan terkait pendidikan, riset, olahraga, serta pariwisata.

Ratih Megasari Singkaru adalah seorang politikus dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024. dan periode 2024- 2029 Sebagai wakil rakyat dari Sulawesi Barat, Ratih memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerahnya, termasuk dalam sektor pendidikan. Sulawesi Barat, sebagai provinsi yang masih dalam tahap pengembangan, menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga kualitas pengajaran.

Dalam konteks ini, peran Ratih Megasari Singkaru sangat penting dalam mendorong perbaikan dan pengembangan pendidikan di provinsi tersebut. Ratih Megasari Singkaru berperan dalam merumuskan dan memperjuangkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Sulawesi Barat. Sebagai anggota DPR-RI, Ratih terlibat dalam pembuatan dan pengawasan undang-undang serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan latar belakang sebagai legislator, ia dapat mengusulkan dan mempromosikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya, seperti pengadaan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan program beasiswa.

Ratih Megasari Singkaru juga memainkan peran kunci dalam melakukan advokasi untuk pendidikan di Sulawesi Barat. Melalui berbagai inisiatif dan program, Ratih berusaha untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di provinsi tersebut. Ini termasuk upaya untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, serta mendorong pemerintah pusat untuk memperhatikan kebutuhan khusus daerah Sulawesi Barat dalam hal pengembangan pendidikan.

Meskipun Ratih Megasari Singkaru telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sektor pendidikan di Sulawesi Barat, tantangan yang ada masih cukup besar. Pendidikan di daerah ini masih mengalami berbagai kendala seperti kekurangan fasilitas, tenaga pengajar yang tidak memadai, dan ketimpangan akses pendidikan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Upaya Ratih Megasari Singkaru dalam Meningkatkan Pendidikan di Sulawesi Barat (Tinjauan Pembangunan Politik)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas didapatkan bahwa pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong rendah, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai Upaya dalam peningkatan pendidikan di Indonesia khususnya di Sulawesi

Barat. Merujuk uraian singkat tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan

1. Bagaimana Upaya Ratih Megasari Singkaru dalam meningkatkan bantuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat?
2. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan bantuan pendidikan yang dilakukan Ratih Megasari Singkaru di Provinsi Sulawesi Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Ratih Megasari Singkaru dalam menyalurkan bantuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat
2. Mengetahui faktor yang menghambat penyaluran bantuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tentang tentang upaya peningkatan pendidikan di Sulawesi Barat oleh Ratih Singkaru, maka secara umum manfaat penelitian ini bertujuan untuk :

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya ilmu politik pada upaya peningkatan pendidikan oleh Ratih Singkaru di Sulawesi Barat

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membuat para pembaca maupun Masyarakat mengetahui upaya yang dilakukan ratih singkaru dalam peningkatan pendidikan di Sulawesi Barat dilihat dari tinjauan pembangunan politik dan legislatif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Politik

Pembangunan politik merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu politik yang membahas bagaimana sistem politik berkembang untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan tuntutan masyarakat. Pembangunan politik tidak hanya dipahami sebagai perubahan struktur kekuasaan, tetapi juga sebagai proses peningkatan kapasitas sistem politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, stabil, dan responsif.

Lucien W. Pye memandang pembangunan politik sebagai proses transformasi sistem politik yang memungkinkan negara dan institusi politiknya mampu merespons tuntutan sosial secara adil dan berkelanjutan. Menurut Pye, pembangunan politik berkaitan erat dengan kemampuan sistem politik untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, mengelola konflik, memperluas partisipasi politik, serta meningkatkan efektivitas dan legitimasi lembaga-lembaga politik. Dengan demikian, pembangunan politik tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau stabilitas kekuasaan, melainkan dari sejauh mana sistem politik mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam perspektif Lucien W. Pye, pembangunan politik mencakup beberapa aspek utama. Pertama, peningkatan kapasitas sistem politik, yaitu kemampuan lembaga-lembaga politik untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif. Sistem politik yang berkembang adalah sistem yang mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang konkret. Kedua, penguatan institusi, di mana lembaga-lembaga negara seperti parlemen, partai politik, dan birokrasi menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan secara optimal. Ketiga, responsivitas dan partisipasi politik, yaitu adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan politik.

Pembangunan politik menurut Pye juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah dan lembaga politik tidak hanya dituntut untuk memiliki otoritas, tetapi juga harus responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks negara demokratis, pembangunan politik tercermin melalui peran aktor-aktor politik yang mampu menjalankan fungsi representasi secara substantif, bukan sekadar formal.

Konsep pembangunan politik Lucien W. Pye sangat relevan untuk menganalisis sektor pendidikan, khususnya di daerah yang masih mengalami keteringgalan seperti Provinsi Sulawesi Barat. Pendidikan merupakan salah satu tuntutan sosial utama yang harus direspons oleh sistem politik, karena kualitas pendidikan berpengaruh langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan demokrasi. Ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya angka putus sekolah mencerminkan adanya tantangan dalam kapasitas sistem politik untuk memenuhi hak dasar warga negara.

Dalam konteks penelitian ini, pembangunan politik dipahami sebagai kemampuan sistem politik nasional dan daerah, melalui peran institusi legislatif dan aktor politik, dalam merespons permasalahan pendidikan di Sulawesi Barat. Peran anggota DPR RI, khususnya yang berada di Komisi X, menjadi bagian dari mekanisme pembangunan politik sebagaimana dimaksud oleh Pye. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, aktor legislatif berperan sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat daerah dengan kebijakan pendidikan di tingkat nasional.

Dengan demikian, konsep pembangunan politik Lucien W. Pye digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peran Ratih Megasari Singkarru sebagai aktor legislatif mencerminkan kapasitas dan responsivitas sistem politik dalam meningkatkan pendidikan di Sulawesi Barat. Upaya-upaya seperti perjuangan beasiswa pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik dipahami sebagai bentuk konkret dari pembangunan politik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penguatan institusi demokrasi.

2.2 Peran Aktor

Teori peran aktor, sering disebut juga sebagai teori aktor dalam ilmu sosial dan politik, yang berfokus pada peran individu atau kelompok dalam proses pembuatan keputusan dan pengaruhnya terhadap hasil politik dan sosial. Teori ini menekankan bagaimana tindakan, motivasi, dan interaksi aktor (individu atau kelompok) mempengaruhi dinamika dan hasil dalam sistem sosial dan politik.

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Menurut Pierre Bourdieu hubungan relasional yakni struktur objektif dan representasi subjektif, agen dan pelaku, terjalin secara dialektik. Fenomena sosial apapun merupakan produk dari tindakan-tindakan individual. Oleh karena itu, logika tindakan harus dilihat (dicari) pada sisi rasionalitas pelakunya.

Aktor merupakan orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Kajian terhadap para aktor dalam formulasi kebijakan sangatlah penting. Baik dalam negara maju maupun sedang berkembang, para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap-tahap proses kebijakan. Menurut Moore (dalam Fauzi dan Rostyaningsih 2018) secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor state, aktor private, dan aktor masyarakat (civil society).

Aktor pemerintah sebagai aktor primer mempunyai hak-hak untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan dan bukan hanya sebagai pemberi saran saja. Dengan adanya peran aktor yang jelas, maka antara aktor primer dan sekunder tidak terjadi tarik menarik kekuatan atau power karena penentu kebijakan tersebut adalah aktor pemerintah atau aktor primer. Dengan adanya penentuan aktor tersebut maka permasalahan mengenai agenda setting yang meliputi penentuan kriteria miskin, refleksi kemiskinan dan bantuan yang berupa pendampingan dapat dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh unsure yaitu pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan unsure

pemerintah dan masyarakat maka tidak akan terjadi tumpang tindih peran dan dapat meningkatkan fungsi jejaring.

(Thompson dalam Wakka,2014) mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

Aktor dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai subyek. Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik;

Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) dan kekuatan (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pemain kunci (key players). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru;

Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) dan kekuatan (power) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain (crowd), untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik; dan

Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (contest setters). Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi key players karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan, sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan. Terdapat empat unsur yang perlu diperhatikan untuk menganalisis keberhasilan peran para aktor dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut: a) Partisipasi aktor, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan; b) Perspektif aktor, yaitu dengan menilai bagaimana aktor-aktor memahami program; c) Aksesibilitas aktor, yaitu dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor dalam pelaksanaan program; dan d) Penentuan tindakan, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan.

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen dalam (Lilik Zainal), memiliki beberapa bagian yaitu :

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul betul dijalankan oleh seorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu
3. Konflik Peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan

secara emosional

5. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu
6. Model Peranan (*Role Mode*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita ikuti.
7. Rangkaian atau lingkup (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada suatu harapan dari masyarakat terhadap individu akan suatu peran, agar dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungan tersebut. Individu dituntut memegang peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan kata lain, peranan merupakan sebagian dari struktur masyarakat, misalnya peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan-peranan lainnya yang tercipta di masyarakat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa temuan sebelumnya yang mungkin terkait atau berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi apakah temanya serupa, sehingga teori atau landasan yang dapat mendukung temuan penelitian ini dapat diperkuat. seperti berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samhudi, Saifuddin Yunus, dan Abidin Nurdin. Pada tahun 2022 dengan judul Teuku Riefky Harsya dan Pembangunan Pendidikan di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Teuku Riefky Harsya sebagai anggota legislatif dari Dapil 1 Aceh telah berhasil memperjuangkan dan mendorong pembangunan pendidikan di Aceh melalui beberapa program dan strategi yang dilakukan, ia melakukan komunikasi politik dengan baik dan membangun kerja sama tim yang solid dari tingkatan Provinsi, Kecamatan dan Desa. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang tindakan yang dilakukan aktor politik legislatif dalam sektor pendidikan, sama-sama menunjukkan bahwa aktor politik berperan melalui program beasiswa dan kebijakan pendidikan nasional yang dibawah ke daerah serta metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Namun yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada teori yang digunakan penelitian terdahulu berfokus pada strategi politik, tidak menekankan teori sosial politik tertentu sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori peran aktor dan pembangunan politik serta pada penelitian terdahulu aktor politik

nya menekankan strategi politik yaitu komunikasi politik sedangkan penelitian yang dilakukan penulis peran aktor politik nya lebih menekankan peran formal sebagai legislator dan pemerhati pendidikan.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aunur Shabur Maajid Amadi, Salsabila Hasan, Nabila Akmalia, dkk. Pada tahun 2023 dengan judul Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model literatur review. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memenuhi biaya pendidikan yang semakin meningkat. Kondisi ini dapat menghambat akses pendidikan yang setara bagi semua warga negara, sehingga menjadi penghambat kemajuan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan program "Indonesia Pintar" sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang mengalami kendala ekonomi dalam memenuhi biaya. Penelitian ini memiliki kesamaan serta perbedaan. Keduanya memiliki kesamaan yaitu menemukan bahwa kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya tenaga pendidik yang menjadi hambatan utama pendidikan. Kemudian yang menjadi pembeda kedua penelitian yaitu pada penelitian terdahulu mencakup nasional sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya mencakup lokal yang berfokus di provinsi Sulawesi Barat, dan peran yang dilakukan pada penelitian sebelumnya melihat kebijakan pemerintah secara nasional sedangkan penelitian yang dilakukan penulis peran individu aktor terhadap pendidikan di daerah.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningrum pada tahun 2023 dengan judul Kebijakan Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan di Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Mutu pendidikan di Aceh Singkil sangat membutuhkan perhatian salah satu faktor penting dalam mempengaruhi pendidikan adalah tenaga pendidik yang tidak memadai di setiap jenjang pendidikan di Aceh Singkil sehingga banyaknya sekolah yang memang masih sangat banyak kekurangan tenaga pendidik seperti guru yang belum tersertifikasi, guru PNS dan guru sudah S1 namun mengajar tidak sesuai bidangnya. Sehingga pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil melalui program-program untuk mendukung pendidikan mulai dari sarana dan prasarana, membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) guru, meningkatkan kualitas pendidikan, proses pendidikan di Aceh Singkil, dan juga memberikan dukungan berupa program-program untuk menunjang dan meningkatnya nilai dan prestasi siswa. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan wawancara, dan analisis data lapangan. Serta pada rumusan masalah yang membahas tentang

hambatan pendidikan, dan memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan di daerah tertinggal serta memberikan rekomendasi kebijakan. Kemudian pada perbedaan kedua penelitian yaitu pada teori, pada penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik dan mutu pendidikan sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan teori pembangunan politik dan peran aktor sehingga pada penelitian yang penulis lakukan menekankan pada program personal legislator sementara penelitian terdahulu mengkaji peran pemerintah daerah Aceh Singkil dengan teori kebijakan publik.

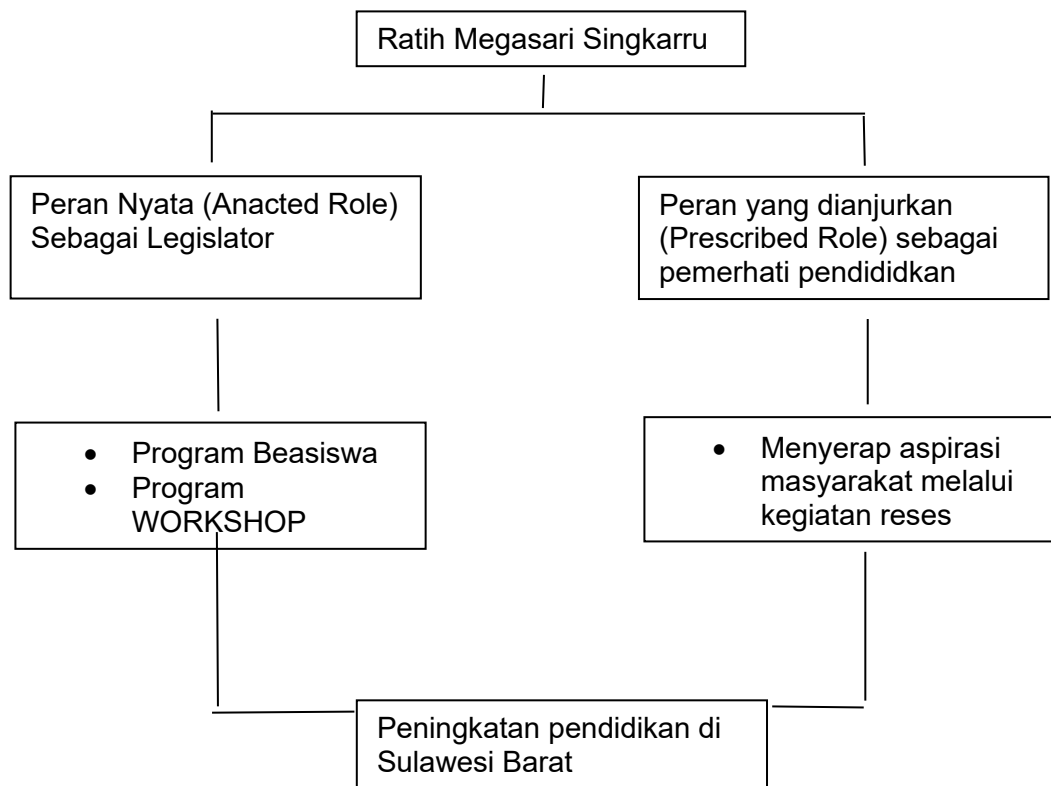
2.4 Kerangka Berfikir

Keberadaan dan kualitas institusi politik memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembangunan politik. Institusi yang kuat dan efektif dapat mendukung stabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi politik, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan pembangunan politik secara keseluruhan. Sebaliknya, kelemahan dalam institusi politik dapat menghambat kemajuan dan mengakibatkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, memperkuat institusi politik harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan politik.

Adanya peran aktor yang akan menentukan keberhasilan dalam setiap program pembangunan di setiap wilayah. Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, kemudian dikaitkan dengan teori peran yang diuraikan oleh Bruce J., Cohen, peran nyata sebagai legislator serta peran yang dianjurkan sebagai pemerhati pendidikan

Aktor sebagai orang yang berpengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai kegiatan aktor memiliki berbagai macam kepentingan yang dilakukan dalam tindakan nyata, baik tindakan yang berdampak positif maupun tindakan yang berdampak negatif. Aktor memiliki jaringan, pengetahuan, dan pengaruh yang besar sehingga mampu menggerakkan masyarakat. Latar belakang penguasaan ekonomi, pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan lingkungan merupakan bagian yang bagian yang tidak terpisahkan dari 'ketokohnya'.

2.5 Skema Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir